

**Analisa Kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan
Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata Kota Salatiga**

Artikel Ilmiah

Diajukan kepada

Fakultas Teknologi Informasi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan Pariwisata



Peneliti :

Silviani (732013608)

Pembimbing :

Yesaya Sandang, M.Hum.

Program Studi Destinasi Pariwisata

Fakultas Teknologi Informasi

Universitas Kristen Satya Wacana

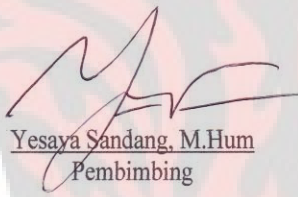
Salatiga

Februari 2016

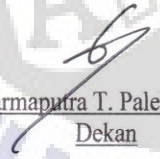
Lembar Pengesahan

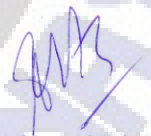
Judul Tugas Akhir : Analisa Kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan Dan
Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata Kota Salatiga
Nama Mahasiswa : Silviani
Nim : 732013608
Program Studi : Destinasi Pariwisata
Fakultas : Teknologi Informasi

Menyetujui


Yesaya Sandang, M.Hum
Pembimbing

Mengesahkan


Dr. Dharmaputra T. Palekahelu, M.Pd
Dekan


Titi Susilowati Prabawa, S.Pd., MA., Ph.D
Ketua Program Studi

Dinyatakan Lulus Ujian tanggal : 4 Februari 2016

Penguji

1. Titi Susilowati Prabawa, S.Pd., MA., Ph.D
2. Rini Kartika Hudiono, S.Pd., MA



**Analisa Kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan Dan
Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata Kota Salatiga**

Oleh,

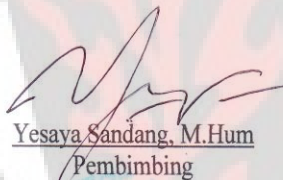
Silviani

NIM : 732013608

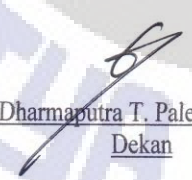
Artikel Ilmiah


Diajukan kepada Program Studi Destinasi Pariwisata Fakultas Teknologi Informasi guna
memenuhi sebagian dari persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Pariwisata

Disetujui oleh,


Yesaya Sandang, M.Hum
Pembimbing

Diketahui oleh,


Dr. Dharmaputra T. Palekahelu, M.Pd
Dekan


Titi Susilowati Prabawa, S.Pd., MA., Ph.D
Ketua Program Studi

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA

2016



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

Jalan Diponegoro 52 - 60
Phone: (0298) 321212 (Hunting)
Fax: (0298) 321433
E-mail: fti@uksw.edu
Salatiga 50711 - INDONESIA



LEMBAR PERSETUJUAN PUBLISH JURNAL

Dengan mempertimbangkan isi dari jurnal mahasiswa :

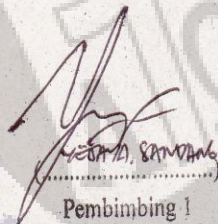
Nama Mahasiswa : Silviani
NIM : 732013608

Maka jurnal ini dinyatakan :

LAYAK TERBIT / ~~TIDAK LAYAK TERBIT~~

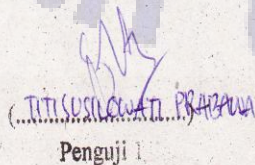
Revisi

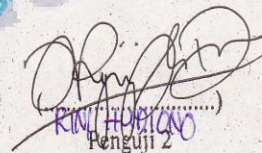
Menyetujui,


Pembimbing 1

(.....)
Pembimbing 2

Mengelahi,


Penguji 1


Penguji 2



PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SILVIANI
NIM : 732013608 Email : an-silviaa@gmail.com
Fakultas : TEKNOLOGI INFORMASI Program Studi : DESTINASI PARIWISATA
Judul tugas akhir : ANALISA KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA DALAM MENGEKEMBANGKAN PARIWISATA
KOTA SALATIGA
Pembimbing : 1. YESA SANDANG, SH, M-Hum
2. _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

1956

Salatiga, 24 FEBRUARI 2016



(SILVIANI)



PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SILVIANI
NIM : 732013608 Email : an-silvia@gmail.com
Fakultas : TEKNOLOGI INFORMASI Program Studi : DESTINASI PARAWISATA
Judul tugas akhir : ANALISA KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI KEBUDAYAAN
DAN PARAWISATA DALAM MENGEKSPANSI PARAWISATA
KOTA SALATIGA

Dengan ini saya menyerahkan hak non-eksklusif* kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):


- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing I dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

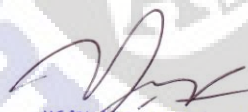
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 24 FEBRUARI 2016


SILVIANI

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,


YESAYA SANDANG, SH, M.Hum

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

Analisa Kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata Kota Salatiga

¹⁾Silviani, ²⁾Yesaya Sandang

Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga 50711, Indonesia
Email: ¹⁾an.silviaa@gmail.com, ²⁾yesayasandang@gmail.com

Abstract

This study was conducted at Department of Transportation, Communication, Culture and Tourism in Salatiga. The methods of research applied qualitative approach descriptively. Data analysis used is descriptive-qualitative method. Sources of data obtained from primary data interviews, and the secondary data from documentation, records, and archives. The results of this study described that Department of Transportation Communications Culture and Tourism Salatiga has policy in developing tourism. The tourism policy is to collate programs and activities that encapsulates the tourism development of the Medium Term Development Plan (RPJMD) that has been set by Salatiga's Government. The development programs in the field of tourism contained in Salatiga's RPJMD include: Tourism Marketing Development Program, Tourism Destination Development Program and Partnership Development Program. Analysis Process is conducted in order to assess whether the tourism policy of the Department of Transportation, Communication Culture and Tourism is good or not.

Keyword : Tourism policy, Tourism development, Salatiga city

¹⁾ Mahasiswi Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Destinasi Pariwisata, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

²⁾ Staff Pengajar Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang kini telah menerapkan kebijakan otonomi daerah. Kebijakan Otonomi Daerah ini meletakkan fondasi pembangunan dengan memberikan otoritas kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat untuk mengembangkan daerah masing-masing. Salah satu yang menjadi unsur pengembangan daerah secara otonomi daerah adalah di bidang pariwisata.³



Gambar 1. ilustrasi struktur pemerintahan

Secara anatomis, urusan pemerintah dibagi dua yakni absolut yang merupakan urusan mutlak pemerintah pusat (hankam, moneter, yustisi, politik luar negeri, dan agama), serta *Concurrent* (urusan bersama pusat, provinsi dan kabupaten/kota). Urusan Pariwisata merupakan salah satu urusan pilihan pemerintah yang bersifat *concurrent*⁴. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* senantiasa ada bagian urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ada bagian urusan yang diserahkan kepada provinsi, dan ada bagian urusan yang diserahkan kepada kabupaten/kota. Dengan demikian secara umum urusan pariwisata yang terkait kebijakan pengembangan pariwisata kabupaten/kota merupakan bagian dari kebijakan pengembangan pariwisata provinsi.

³Jurnal Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pengelolaan Taman Nasional Bunaken Propinsi Sulawesi Utara oleh Rommy Poli Vol.I/No.5/Okttober-Desember /2013

⁴*concurrent* : urusan pemerintahan yang penanganannya dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. <http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/> diakses terakhir 24 Juni 2015

Kota Salatiga adalah kota kecil yang berada di Propinsi Jawa Tengah dan mempunyai posisi geografis yang sangat strategis serta menjadi salah satu kota pendukung pada Kawasan Joglosemar (Jogja-Solo-Semarang) yang memfungsikan sebagai Kota Pendidikan, Kota Transit Pariwisata, serta Kota Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya dikenal dengan Tri Fungsi Kota Salatiga.⁵

Sebagai kota transit pariwisata, banyak hal yang disuguhkan oleh Salatiga seperti destinasi wisata kolam renang Kalitaman yang merupakan kolam renang tertua di Salatiga, Atlantic Dreamland sebagai wisata bermain anak-anak, Desa Wisata Tingkir Lor, *Event* adat di desa-desa, wisata kuliner tradisional di berbagai tempat di Salatiga, pawai budaya, dan sebagainya. Semua itu merupakan beberapa daya tarik wisata yang dapat mengundang banyak orang dari luar kota untuk datang ke Salatiga.

Selain daya tarik berupa atraksi, *event* dan obyek wisata, Salatiga sendiri mempunyai beberapa fasilitas-fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, taman kota, sarana transportasi, Bank, *Spa*, *Resort*, dan sebagainya. Kota Salatiga mempunyai 25 hotel dengan beberapa klasifikasi yaitu dua buah Hotel berbintang 4, satu buah Hotel berbintang 3, 15 hotel melati, 5 buah wisma, dan 1 buah pondok wisata (BPS Salatiga 2014). Sehingga melengkapi wacana bahwa Salatiga merupakan kota transit pariwisata dimana fasilitas-fasilitas tersebut menjadi pelengkap dan sarana pendukung bagi wisatawan yang datang ke Salatiga.

Untuk lebih memajukan sektor pariwisata di kota Salatiga tentunya tidak terlepas adanya peran serta semua pelaku pariwisata baik itu pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini adalah melalui Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan dan Pariwisata (Dishubkombudpar) kota Salatiga sebagai instansi yang mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan kepariwisataan di era otonomi daerah. Apabila dinas terkait dapat mengembangkan pariwisata dengan tepat serta promosi yang menarik, maka para wisatawan yang melewati kota Salatiga akan senantiasa mengunjungi kota Salatiga.

⁵Dalam jurnal Nurgianto Konsep Perancangan Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Fisik Kawasan Perdagangan dan Jasa Jalan Jenderal Sudirman Kota Salatiga © 2013 Biro Penerbit Planologi Undip Volume 9 (1): 20-30 Maret 2013

Dengan meningkatnya wisatawan yang masuk maka secara langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat kota Salatiga merupakan kota dengan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terkecil di Jawa Tengah⁶. PDRB Kota Salatiga pada tahun 2004 adalah sebesar 693.286,63 juta atau hanya sebesar 0,5% dari total PDRB Jawa Tengah. Meskipun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi PDRB Kota Salatiga masih merupakan yang terkecil di Jawa Tengah pada tahun 2008 yaitu sebesar 832.154,88 juta. (BPS PDRB Jawa Tengah 2008).

Oleh karena itu, kota Salatiga memerlukan kebijakan program pariwisata yang baik agar pembangunan dan pengembangannya bisa lebih terarah sehingga sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi daerah.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisa Kebijakan Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Pariwisata Di Kota Salatiga.”

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah kebijakan apa saja yang dimiliki oleh pemerintah kota Salatiga dalam mengembangkan Pariwisata. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kebijakan pariwisata yang dimiliki oleh Dishubkombudpar kota Salatiga sudah baik atau belum. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah bahan referensi untuk kajian penelitian lanjutan atau sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya bagi pihak institusi pendidikan. Sedangkan bagi pihak terkait, informasi ini dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan dalam pengembangan pariwisata.

Dalam penelitian ini akan memaparkan kebijakan pariwisata yang dimiliki oleh Dishubkombudpar dalam mengembangkan pariwisata kota Salatiga kemudian hasil temuan akan diolah kemudian dianalisis menggunakan instrumen kebijakan yaitu: piranti hukum, tatanan kelembagaan, dan mekanisme operasional. Pada bagian penutup akan ditarik kesimpulan dan saran.

⁶Dalam jurnal penelitian Aswin Rizkiano 2011 “Pengukuran Tingkat Kemampuan Daerah Dalam Mendukung pelaksanaan otonomi Daerah Periode 2004-2008 di Kota Salatiga”.

2. Landasan Teori

2.1 Pengembangan Pariwisata

Menurut Fandeli (2001:37) Pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Menurut Marpaung (2002:78) objek wisata adalah suatu bentukan atau aktivitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk dapat datang kesuatu tempat/daerah tertentu. Selanjutnya Marpaung (2002:78) juga menerangkan bahwa objek wisata adalah dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya objek wisata disuatu daerah kepariwisataan sulit untuk dikembangkan.

Menurut Joyosuharto (1995:46) bahwa pengembangan pariwisata memiliki 3 fungsi, yaitu : menggalakkan ekonomi, memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa. Untuk menjalankan ketiga fungsi tersebut maka diperlukan pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata, meningkatkan dan mengembangkan promosi dan pemasaran, serta meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.

Salah satu fungsi dari kebijakan pariwisata adalah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Penelitian yang berkaitan dengan fungsi kebijakan pariwisata tersebut pernah dilakukan oleh Timang Setyorini (2005) dengan judul “ Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang”, hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa Kebijakan Pemerintah Kabupaten Semarang di sektor pariwisata melalui Perda-perda yang ada ternyata telah bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat. Adapun rumusan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengetahui usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Semarang dan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan mengetahui seberapa jauh kebijakan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Kabupaten Semarang.

2.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Mengembangkan Pariwisata

Dari segi bahasa, Kebijakan berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polis* kemudian terserap menjadi bahasa latin *Plitea* yang berarti negara dan akhirnya dalam bahasa Inggris *Policy* yang diartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian masalah - masalah politik atau administrasi pemerintahan. Asal kata *Policy* sama dengan kata lain *Police and Politics* (Dunn,2000). Istilah *Policy* (kebijakan) sering kali penggunaanya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang – undang dan ketentuan - ketentuan.

Kebijakan Pariwisata merupakan petunjuk umum yang memberi kerangka bagi pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan pada aras dibawahnya. Kebijakan mempunyai peranan penting bagi pelaksana rencana.

Goeldner dan Ritchie (2006 : 7) mendefinisikan kebijakan pariwisata sebagai seperangkat regulasi, aturan, pedoman, arah, dan sasaran pembangunan/promosi serta strategi yang memberikan kerangka kerja yang dapat mempengaruhi pengembangan pariwisata termasuk aktivitas yang berlangsung di suatu kawasan wisata baik dalam jangka panjang dan pendek.

“Tourism policy can be defined as a set of regulations, rules, guidelines, and development and promotion objective and strategies that provide a framework within which collective and individual decisions directly affecting long-term development and the daily activities within a destination are taken.”

Sedangkan Menurut Edgell, dkk (2008) mengemukakan bahwa kebijakan pariwisata merupakan program, pedoman ,arahan, prinsip,dan prosedur yang ditetapkan dalam kerangka etika yang terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan / kebutuhan masyarakat dengan perencanaan, pengembangan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata di masa yang akan datang, seperti yang dinyatakan berikut ini:

“Tourism policy is a progressive course of actions, guidelines, directives, principles, and procedures set in an ethical framework that is issues-focused and best represents the intent of a community (or nation) to effectively meet its planning, development, product, service, marketing, and sustainability goals and objectives for the future growth of tourism”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pariwisata adalah merupakan payung yang menaungi hal - hal yang berkaitan dengan aktivitas kepariwisataan termasuk pengelolaan dan pengembangannya, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka menengah.

Kebijakan kepariwisataan terkait erat dengan perencanaan kepariwisataan. Menurut Edgell, dkk. (2008) perencanaan kepariwisataan memperkuat kedudukan kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan. Perencanaan pariwisata sendiri memiliki tingkatan perencanaan, hal ini disesuaikan dengan skala kegiatan secara spasial. Perencanaan pariwisata pada tingkat nasional membahas mengenai kebijakan nasional wisata, rencana struktural, dan standar pelayanan. Pada tingkat provinsi perencanaan pariwisata membahas kebijakan pariwisata ditingkat provinsi, jaringan transportasi pendukung pariwisata, fasilitas dan jasa pendukung pariwisata, dan bagaimana keterhubungan dengan sektor lain. Dan pada tingkat tapak perencanaan pariwisata membahas mengenai lokasi bangunan dan fasilitas yang harus tersedia dilokasi objek wisata.

Hirarki perencanaan pembangunan kepariwisataan meliputi berbagai tingkatan yaitu diantaranya adalah :

1. Tingkat nasional (*national planning*), mencakup wilayah nasional dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) yang meliputi :
 - a. Undang - Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
 - b. Rencana Perencanaan Jangka Menengah (RPJM)
 - c. Rencana Induk Perencanaan Nasional (RIPNAS)
2. Tingkat Daerah Tujuan Wisata (DTW), Sub Daerah Tujuan Wisata (SUB DTW), dan Kawasan mencakup wilayah kabupaten dan propinsi dengan mengacu pada Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Daerah (RENSTRADA) yang meliputi :

- a. Rencana Induk Perencanaan Daerah Tingkat 1 (RIPDA Tk 1)
 - b. Rencana Induk Perencanaan Daerah (RIPDA)
 - c. Rencana Induk Pengembangan Kawasan
3. Obyek wisata, mencakup wilayah dimana obyek wisata tersebut berada dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang (RTR) dan desain teknis yang meliputi rencana tapak dan desain teknis.

Kebijakan pengembangan pariwisata memerlukan perencanaan yang baik secara nasional, regional atau provinsi dan kawasan ataupun obyek. Perencanaan secara nasional disusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku serta berbagai *issues*⁷ yang sedang berkembang. Sementara itu pengembangan pariwisata regional atau lokal didasarkan pada regulasi di daerah serta persepsi dan preferensi masyarakat sebagai bentuk dari partisipasi masyarakat.

Conyers dan Hills (1990:15) menggambarkan perencanaan melalui tiga aktivitas yang saling berhubungan, dimana aktivitas yang satu diikuti aktivitas yang lainnya, yaitu diawali dengan pengambilan kebijakan (*policy making*), dikembangkan melalui proses perencanaan dan kemudian diimplementasikan. Perencanaan digambarkan seolah-olah sebagai tahap peralihan antara pengambilan kebijakan dan implementasi, karena perencanaan digunakan sebagai alat untuk menterjemahkan kebijakan-kebijakan umum kedalam program-program aksi praktis yang lebih nyata. Rencana kerja yang merupakan penjabaran dari rencana strategis telah memuat program-program dan kegiatan yang dapat dijadikan pedoman baik jangka panjang maupun jangka pendek.

2.3 Analisis Kebijakan Terhadap Pengembangan Pariwisata

William Dunn mendefinisikan analisis kebijakan adalah aktivitas intelektual dan praktis yang ditunjukkan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan tentang dan dalam proses kebijakan (Nugroho , 2007:7). Definisi analisis kebijakan dari Walter William adalah sebuah cara penyintesisan informasi termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan format keputusan kebijakan (yang ditentukan dari sejumlah alternatif pilihan) dan menentukan informasi yang relevan dengan kebijakan (Nugroho D., 2007:36).

⁷ Issue” sebagai ‘suatu pertanyaan tentang fakta, nilai atau kebijakan yang dapat diperdebatkan’ (‘a contestable question of fact, value or policy’) (Heath & Nelson 1986)

Sedangkan menurut Thomas R. Dye, analisis kebijakan adalah apa sesungguhnya yang dilakukan pemerintah-pemerintah, kenapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan capaian hasilnya berbeda-beda (Wahab, 2011:4).

Dapat disimpulkan bahwa analisis kebijakan merupakan sebuah cara menyimpulkan informasi termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan dan menciptakan format keputusan kebijakan (yang ditentukan dari sejumlah alternatif pilihan), secara kritis menilai, mengkomunikasikan pengetahuan dan menentukan informasi yang relevan tentang dan dalam proses kebijakan.

Suatu kebijakan esensinya akan menggambarkan strategi, prioritas, tujuan, sasaran, dan hasil (*outcome*) yang diharapkan. Agar kebijakan berfungsi efektif, diperlukan “instrumen/alat” kebijakannya (*policy tools/instruments*). Jadi, instrumen kebijakan adalah seperangkat langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan kebijakan yang ditetapkan.

Penelitian mengenai analisis kebijakan pariwisata pernah dilakukan oleh Dian Novitasari (2014) dengan judul “Analisis Kebijakan Terhadap Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pemerintah mengembangkan potensi pariwisata di Wonosalam dalam perspektif analisis kebijakan. Secara teoritis, masalah ini dijelaskan dengan menggunakan perspektif teoritis Instrumen Kebijakan oleh Tatang A. Taufik yang termasuk perangkat hukum, pengaturan kelembagaan dan mekanisme operasional.

Menurut Tatang A. Taufik setiap (atau kombinasi beberapa) instrumen kebijakan biasanya melibatkan (mengandung) setidaknya 3 (tiga) aspek, yaitu: 1) piranti hukum menyangkut aspek legal/hukum yang mendukungnya (melandasinya); 2) tatanan kelembagaan berkaitan dengan tatanan lembaga (organisasi) yang terlibat, fungsi/peran dan pengorganisasian (struktur dan hubungan atau interaksi antar aktor); 3) mekanisme operasional berkaitan dengan pola, cara/metode dan prosedur serta proses pelaksanaan dalam implementasi praktis.

Dengan adanya analisis kebijakan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan instrumen kebijakan yaitu: piranti hukum, tatanan kelembagaan, dan mekanisme operasional.

3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang mengkaji perspektif partisipan dengan strategi – strategi yang bersifat interaktif dan humanistik, dengan memahami fenomena – fenomena sosial dari sudut pandang partisipan (Rossman & Rallis, 1998; dalam Creswell, 2002). Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses bukan pada hasil. Kemudian dengan penggunaan metode kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menginterpretasikan data agar diperoleh pemahaman dan hasil analisis data sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mengetahui kebijakan program yang dimiliki oleh Dishubkombudpar. Data merupakan faktor penting dalam penelitian, untuk itu diperlukan teknik tertentu dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik wawancara

Esterberg, dalam Sugiyono (2012 : 231) mendefinisikan interview sebagai berikut: Teknik wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. *“a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic”*. Melalui wawancara ini peneliti menggali informasi secara mendalam dari Bapak Selso Vecente selaku kepala seksi bidang pariwisata dan Bapak Jarwardi selaku Kabid Kebudayaan dan Pariwisata Dishubkombudpar. mengenai Kebijakan program – program apa saja yang telah diterapkan oleh pemerintah kota Salatiga dalam mengembangkan pariwisata. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur ,dan semiterstruktur. Esterberg, dalam Sugiyono (2012:233) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan), dan semiterstruktur.

Wawancara semiterstruktur (pelaksanaan wawancara lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan pemasalahan secara lebih terbuka dimana informan dimintai pendapat dan ide-idenya).

2. Teknik dokumen

Teknik dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan sumber bukan manusia, non human resources, diantaranya dokumen. Sugiyono (2012:240), mengemukakan pendapatnya mengenai dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Penulis mengumpulkan dokumen yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata kota Salatiga dari Dishubkombudpar. Dokumen-dokumen tersebut berupa dokumen Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2015 kota Salatiga.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dishubkombudpar) jalan Magersari 166 Tegalrejo Salatiga.

Sekilas tentang Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan Dan Pariwisata Salatiga

Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan dan Pariwisata Daerah (Dishubkombudpar) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan dan Pariwisata Salatiga yang menangani bidang pariwisata saat ini terbagi menjadi dua yaitu bidang pariwisata dan bidang kebudayaan. Dishubkombudpar Salatiga telah beroperasi sejak 2008 atas dikeluarkan Peraturan Daerah no 10 tahun 2008.

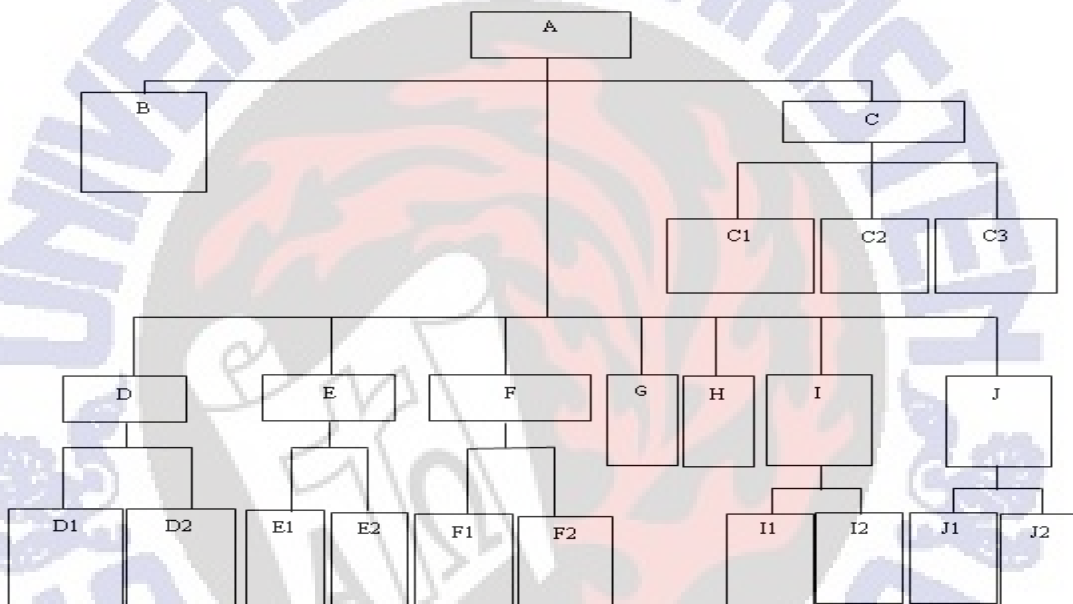
Dengan berdasar pada Perda No 8 Tahun 2011 tentang perubahan peraturan daerah kota Salatiga No 10 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kota Salatiga, Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam struktur pemerintahan kota Dishubkombudpar bidang Pariwisata dan Kebudayaan Salatiga mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam menyusun rencana kegiatan teknis di bidang pariwisata dan kebudayaan, memberikan

pertimbangan, rekomendasi dan melaksanakan pengembangan dibidang kebudayaan dan pariwisata serta melakukan pengendalian, penilaian, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan tugas.

Adapun struktur organisasi dan Dishubkombudpar Salatiga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA



Keterangan:

A : Kepala Dishubkombudpar
B : Jabatan Fungsional Penguji
Kendaraan Bermotor
C : Sekretaris Dishub
C1 : Kasubag Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan
C2 : Kasubag Keuangan
C3 : Kepegawaian Kasubag
Umum dan\

D : Kabid Lalu Lintas
D1 : Kasi Manajemen Rekayasa
Lalu Lintas
D2 : Kasi Pengendalian dan
Pengamanan
E : Kabid Angkutan
E1 : Kasi Angkutan Barang
E2 : Kasi Pengujian Kendaraan
F : Kabid Kelaikan Kendaraan

F1 : Kasi Perbengkelan
Kendaraan

F 2 : Kasi Perbengkelan Umum

G : Ka. UPTD Terminal

H : Ka. UPTD Parkiran

I : Kabid Komunikasi dan
Informatika

I1 : Kabid Komunikasi dan
Informatika

I.2 : Kasi Informatika

J : Kabid Kebudayaan &
Pariwisata

J1 : Kasi Kebudayaan

J2 : Kasi Pariwisata

Sumber diolah: Data Dishubkombudpar Salatiga

5. Hasil Penelitian

Dalam bagian ini dibahas mengenai hasil data-data yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Hasil dan pembahasan data ini terbagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama adalah pemaparan kebijakan yang dimiliki oleh Dishubkombudpar Kota Salatiga dan bagian yang kedua adalah menganalisa kebijakan Dishubkombudpar tersebut menggunakan instrument analisis kebijakan.

5.1 Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pemerintah Kota Salatiga

Conyers dan Hills (1990:15) menggambarkan perencanaan melalui tiga aktivitas yang saling berhubungan, dimana aktivitas yang satu diikuti aktivitas yang lainnya, yaitu diawali dengan pengambilan kebijakan (*policy making*), dikembangkan melalui proses perencanaan dan kemudian diimplementasikan.

5.1.1 Pengambilan Kebijakan

Pengambilan kebijakan pengembangan pariwisata kota Salatiga dilakukan oleh pemerintah kota dengan mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan musrenbang ini diharapkan perencanaan pembangunan kota Salatiga termasuk pengembangan pariwisata lebih terarah dan terpadu sehingga akan tercapai sinergi antara kebutuhan masyarakat, skala prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. Penentuan kebijakan program dan prioritas kegiatan senantiasa mengacu pada RPJMD Kota Salatiga dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah.

5.1.2. Proses Perencanaan

Pada proses perencanaan pengembangan pariwisata, Dishubkombudpar menyusun program dan kegiatan pengembangan pariwisata yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dishubkombudpar yang diatur dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan Dan Pariwisata kota Salatiga. Adapun program yang telah disusun Dishubkombudpar dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata yang ada di Kota Salatiga meliputi program pengembangan promosi pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata dan program kemitraan pariwisata.

Program-program tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kota Salatiga Tahun 2011 – 2016. Adapun program dan kegiatan yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah bidang urusan pariwisata pemerintah kota Salatiga melalui Dishubkombudpar dalam mengembangkan pariwisata adalah sebagai berikut:

Program dan kegiatan tahun 2015

I. Program pengembangan pemasaran pariwisata, meliputi :

- Mengikuti pameran/festival di Jakarta, Semarang, Solo, dan Bali
- Pembuatan dan penyebaran peta wisata
- Pembuatan dan penyebaran kalender of event
- Pemilihan duta wisata tingkat kota Salatiga
- Memfasilitasi partisipasi duta wisata kota Salatiga dalam pemilihan tingkat propinsi Jawa Tengah
- Lomba Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tingkat kota Salatiga
- Memfasilitasi partisipasi Pokdarwis kota Salatiga dalam lomba Pokdarwis tingkat propinsi Jawa Tengah (24-26 Agustus 2015)
- Fasilitasi rapat – rapat koordinasi stakeholder pariwisata

II. Program pengembangan destinasi :

Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

- Renovasi dan menambahkan fasilitas di obyek wisata pemandian Kalitaman Salatiga

III. Program Pengembangan Kemitraan, meliputi:

Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan, meliputi sub kegiatan :

- Monitoring penyelenggaraan usaha pariwisata terutama usaha hiburan dan rekreasi
- Evaluasi terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata terutama usaha hiburan dan rekreasi
- Pengumpulan data usaha pariwisata

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata, dengan sub kegiatan :

- Bimbingan teknis manajemen pengembangan usaha pariwisata, terutama yang berkaitan dengan usaha hotel, desa wisata, manajemen pelayanan prima, pramuwisata, biro perjalanan wisata, sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata.

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengembangkan Kemitraan Pariwisata, dengan sub kegiatan ;

- Fasilitasi partisipasi Pokdarwis dalam Kirab Budaya hari jadi kota Salatiga
- Fasilitasi kegiatan administrasi Pokdarwis
- Fasilitasi partisipasi Paguyuban duta wisata
- Pelaksanaan Aksi Sapta Pesona di Desa Wisata

(Sumber diolah: Data SKPD Tahun 2015 Dishubkombudpar)

5.1.3 Implementasi Program Dan Kegiatan

Dari hasil wawancara dengan Bapak Selso Vecente selaku Kepala Seksi bidang Pariwisata dan data-data yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi dari perencanaan Dinas Perhubungan Komunikasi Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Salatiga adalah bagian dari proses perencanaan. Dalam proses perencanaan telah ditentukan pihak-pihak yang melaksanakan program kegiatan. Hal ini berarti bahwa implementasi perencanaan merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan.

Program dan kegiatan pengembangan pariwisata dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Program pengembangan pemasaran pariwisata

Pemerintah kota Salatiga telah mempromosikan atau memasarkan produk – produk wisata yang dimiliki oleh kota Salatiga kepada masyarakat lokal dan luar daerah dengan membuat dan menyebarkan brosur, kalender of event, peta wisata. Juga mengikuti pameran / festival di Jakarta, Semarang, Solo, dan Bali. Memfasilitasi partisipasi Duta Wisata kota Salatiga dalam pemilihan tingkat propinsi Jawa Tengah, Lomba kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) tingkat kota Salatiga, Memfasilitasi partisipasi Pokdarwis kota Salatiga dalam lomba Pokdarwis tingkat propinsi Jawa Tengah (24-26 Agustus 2015), Fasilitas rapat – rapat koordinasi *stakeholder* pariwisata.

“Dalam hal kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata Dishubkombudpar telah membuat brosur dan disebar kepada masyarakat Salatiga sendiri ataupun di luar kota Salatiga. Selain brosur juga membuat calendar of event dan peta wisata. Brosur, calendar of event dan peta wisata disebar ke objek – objek wisata atau pada saat mengikuti pameran / festival di beberapa kota seperti Jakarta, Semarang, Solo, dan Bali. Kemudian diadakan pemilihan mas dan mbak kota Salatiga yang akan membantu mempromosikan pariwisata yang dimiliki oleh Salatiga.”(Selso)

2. Program pengembangan destinasi :

Kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

Program pengembangan destinasi merupakan pengembangan lokasi objek wisata. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata kota Salatiga diperlukan penanganan yang professional dari pemerintah setempat, agar objek wisata dapat terjaga kelestariannya / *sustainable*, sehingga dapat menumbuhkan perkembangan pengunjung wisatawan pada objek-objek wisata yang terdapat di Kota Salatiga. Objek wisata adalah dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya objek wisata disuatu daerah kepariwisataan sulit untuk dikembangkan. Marpaung (2002:78). Oleh karena itu Pemerintah kota Salatiga berupaya untuk mengembangkan objek wisata yang ada di kota Salatiga.

“Pemerintah kota Salatiga akan terus berupaya untuk mengembangkan objek wisata yang terdapat di Kota Salatiga. Seperti objek wisata pemandian kalitaman. Pengembangan objek wisata ini

adalah pembangunan secara fisik sarana dan prasarana di objek wisata pemandian kalitaman. Seperti terwujudnya peningkatan fasilitas plorotan/luncuran untuk kolam anak – anak,tempat duduk berpayung, pompa sedot dan genset di objek wisata pemandian kalitaman.”(Selso)

3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata

Pengembangan destinasi wisata merupakan salah satu konsep pengembangan kemitraan. Pola pengembangan kemitraan pariwisata memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah maupun sektor swasta secara sinergis. Perkembangan ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan apabila ada dukungan dari semua pihak (pemerintah, swasta, dan masyarakat). Untuk tercapainya hal tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan koordinasi, antara unsur pemerintah (pusat / daerah) Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, masyarakat, dan pengusaha pariwisata di dalam pemantapan pengembangan pariwisata. Adapun kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam pelaksanaan program ini adalah :

Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Kemitraan

“Kegiatan ini memiliki tiga sub kegiatan antara lain : Memonitoring penyelenggaraan usaha pariwisata terutama usaha hiburan dan rekreasi, evaluasi terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata terutama usaha hiburan dan rekreasi, pengumpulan data usaha pariwisata. Usaha hiburan dan rekreasi ini seperti halnya usaha hiburan karaoke, tempat –tempat hiburan milik swasta, beserta tempat-tempat penginapan di Salatiga. Pengumpulan data usaha pariwisata sebanyak 150 usaha.”(Selso)

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Profesionalisme Bidang Pariwisata, dengan sub kegiatan :

Mengadakan bimbingan teknis manajemen pengembangan usaha pariwisata, terutama yang berkaitan dengan usaha hotel, desa wisata, manajemen pelayanan prima, pramuwisata, biro perjalanan wisata, sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di bidang pariwisata.

“Pada kegiatan ini Dishubkombudpar mengadakan pelatihan dan memfasilitasi kegiatan praktek memandu lapangan yang

dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 15 dan 16 Oktober 2015 di kawasan wisata Candi Dieng Wonosobo”. Kegiatan praktek memandu ini diikuti oleh 20 peserta yang terdiri dari aparatur pemerintah yang menangani pariwisata dan pelaku usaha pariwisata.(Selso)

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Mengembangkan Kemitraan pariwisata

Dengan sub kegiatan: fasilitasi partisipasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Kirab Budaya hari jadi kota Salatiga, fasilitasi kegiatan administrasi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), fasilitasi partisipasi Paguyuban Duta Wisata, Pelaksanaan Aksi Sapta Pesona di Desa Wisata.

“Dishubkombudpar memfasilitasi kelompok sadar wisata kota Salatiga dalam rangka merayakan hari berdirinya kota Salatiga pada tanggal 24 Juli. Dan juga memfasilitasi Kirab Budaya yang merupakan rangkaian acara peringatan Hut Kemerdekaan RI ke 70 dan hari jadi kota Salatiga yang ke 1265. Kirab Budaya diikuti oleh 28 peserta paguyuban seni drumband, drumblek, reog tari dan maramis. Kelompok pokdarwis Kota Salatiga adalah Kelompok Sadar Wisata Tingkir Lor, Kelompok Sadar Wisata Noborojo, Kelompok Sadar Wisata Kecandran, Kelompok Sadar Wisata Tegalrejo. Dishubkombudpar memfasilitasi Pokdarwis dalam kegiatan rapat bersama dan pemberian alat tulis kantor (ATK) dalam kegiatan administrasinya.”(Selso)

“Aksi Sapta Pesona untuk pengembangan desa wisata. Ini merupakan salah satu kegiatan kemitraan yang mengikutsertakan 80 an warga kelurahan Kecandran untuk mengikuti kerja bakti bersih-bersih lingkungan dan menanam pohon. Aksi ini dilaksanakan pada tanggal 7 Juni. Kegiatan ini dilaksanakan di kelurahan Tingkir Lord an Kecandran. Pada waktu yang bersamaan kedua kelurahan ini sengaja dipilih menjadi lokasi pelaksanaan Aksi Sapta Pesona dengan pertimbangan bahwa sejak tahun 2013 di kelurahan tersebut telah dibentuk Pokdarwis dimana tugas utamanya adalah

mengupayakan penyadaran masyarakat untuk bertindak sebagai tuan rumah yang baik menyambut kunjungan wisata. Pengembangan Tingkir sebagai desa wisata sudah ditetapkan dengan SK Walikota no 556/349/2015. Sedangkan untuk kelurahan Kecandran sesuai hasil kajian dari Bappeda pada 2014, pengembangannya akan diarahkan sebagai agrowisata. (Jarwardi)

5.2 Analisa Kebijakan Dishubkombudpar Dalam Mengembangkan Pariwisata

Analisis kebijakan merupakan sebuah cara menyimpulkan informasi termasuk hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, untuk menghasilkan dan menciptakan format keputusan kebijakan, secara kritis menilai, mengkomunikasikan pengetahuan dan menentukan informasi yang relevan tentang dan dalam proses kebijakan pariwisata kota Salatiga.

Agar kebijakan berfungsi efektif, diperlukan “instrumen/alat” kebijakannya (*policy tools/ instruments*). Jadi, instrumen kebijakan adalah seperangkat langkah atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk merealisasikan kebijakan yang ditetapkan. Menurut Tatang A. Taufik setiap (atau kombinasi beberapa) instrumen kebijakan biasanya melibatkan (mengandung) setidaknya 3 (tiga) aspek, yaitu: 1) piranti hukum menyangkut aspek legal/hukum yang mendukungnya (melandasinya); 2) tatanan kelembagaan berkaitan dengan tatanan lembaga (organisasi) yang terlibat, fungsi/peran dan pengorganisasian (struktur dan hubungan atau interaksi antar aktor); 3) mekanisme operasional berkaitan dengan pola, cara/metode dan prosedur serta proses pelaksanaan dalam implementasi praktis.

Dengan adanya analisis kebijakan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan instrumen kebijakan yaitu: piranti hukum, tatanan kelembagaan, dan mekanisme operasional.

1. Piranti hukum

Dengan adanya kebijakan pengembangan pariwisata, pemerintah dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam mengembangkan pariwisata. Secara umum kebijakan pengembangan pariwisata Kota Salatiga merupakan bagian dari kebijakan pengembangan pariwisata Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-undang no. 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional diisyaratkan bahwa daerah memiliki

kewenangan dalam pembangunan daerah termasuk pembangunan dan pengembangan pariwisata yang secara hirarkis harus berada dalam kerangka perencanaan skala propinsi dan nasional. Namun berdasarkan data di lapangan kebijakan pengembangan pariwisata tersebut belum tertuang dalam bentuk dokumen bersama. Kebijakan pengembangan pariwisata di Jawa Tengah meliputi kebijakan pengembangan pariwisata yang dilakukan masing-masing institusi pemerintah Kabupaten maupun Kota yang dituangkan dalam bentuk produk hukum daerah masing-masing. Sedangkan kebijakan pengembangan pariwisata di Salatiga belum lengkap karena belum disusun Rencana Induk Pengembangan Daerah (RIPDA) yang menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata, sehingga kegiatan pengembangan pariwisata di kota Salatiga belum berjalan secara maksimal. Padahal sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 pasal 30 huruf a bahwa Pemerintah Kabupaten/ kota berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.

2. Tata nana kelembagaan

Aspek pemerintahan sangat menentukan peran dan kewenangan setiap lembaga pemerintah. Hal ini menyangkut tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan proses pemerintahan diantara berbagai lembaga pemerintahan. Tata nana kelembagaan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata di kota Salatiga meliputi peran Dishubkombudpar menjalin hubungan kerjasama dan komunikasi antar pegawai dishubkombudpar sendiri dengan instansi yang lainnya sudah berjalan dengan baik. Namun, perlunya penataan kelembagaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada beberapa SKPD Dishubkombudpar.

3. Mekanisme operasional

Mekanisme operasional kebijakan program pengembangan pariwisata belum sepenuhnya terwujud sesuai dengan RPJMD kota Salatiga. Yang menjadi kendala dalam mewujudkan capaian pelaksanaan program RPJMD antara lain; RPJMD belum sepenuhnya menjadi acuan perencanaan pembangunan, program pemerintah pusat dan program pemerintah provinsi seringkali muncul setelah pemerintah daerah selesai menyusun Renja, serta kendala terakhir adalah adanya kecenderungan bahwa ukuran keberhasilan program dan kegiatan hanya dilihat dari tingkat serapan anggaran, tanpa memperhatikan output dari program dan kegiatan. Pelaksanaan pengembangan pariwisata dilakukan oleh masyarakat dan

Dishubkombudpar. Pengelolaan beberapa obyek wisata dilakukan oleh masyarakat, sedangkan kerjasama dengan berbagai instansi-instansi terkait serta mempromosikan potensi pariwisata melalui seminar-seminar/festival, maupun pameran dilakukan oleh Dishubkombudpar.

Masyarakat kota Salatiga sudah berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata dengan membentuk lembaga kelompok sadar wisata (pokdarwis). Masyarakat merupakan salah satu *stakeholder* penting dalam pengembangan pariwisata disamping pemerintah dan swasta. serta adanya beberapa obyek wisata yang dikelola masyarakat. Sedangkan *stakeholder* pariwisata membantu mempromosikan potensi wisata yang ada dan juga ikut membantu mengelola beberapa obyek wisata

Kesimpulan

Setelah melakukan analisa kebijakan, peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian berdasarkan hasil temuan data di lapangan. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis kebijakan terhadap pengembangan pariwisata di kota Salatiga, maka dapat diambil kesimpulan : Dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata, Dishubkombudpar selalu berusaha dalam mengembangkan pariwisata di Kota Salatiga yaitu dengan melakukan program promosi pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata dan program kemitraan pariwisata. Apabila dilihat dari sudut pandang teori dengan menggunakan 3 instrumen yaitu piranti hukum, tatanan kelembagaan dan mekanisme operasional dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan pariwisata di Salatiga belum lengkap karena belum disusun Rencana Induk Pengembangan Daerah (RIPDA) yang menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata, sehingga kegiatan pengembangan pariwisata di kota Salatiga belum berjalan secara maksimal. Pada tatanan kelembagaan, perlu penataan kelembagaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada SKPD Dishubkombudpar. Sedangkan dari segi mekanisme operasionalnya, masyarakat kota Salatiga sudah berpartisipasi aktif dalam pengembangan pariwisata dengan membentuk lembaga kelompok sadar wisata (pokdarwis).

Saran

Berdasarkan uraian di atas maka saran yang direkomendasi dalam rangka mendukung optimalisasi pengembangan pariwisata antara lain:

1. Meningkatkan kerjasama antara stakeholder pariwisata seperti pemerintah, pelaku di industri pariwisata, masyarakat, dan pihak swasta untuk menunjang kelancaran pengembangan pariwisata.
2. Partisipasi lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan dalam menjaga, dan mengontrol integritas kekayaan alam dan budaya daerah.
3. Mengadakan pelatihan pengembangan sumber daya manusia agar dapat mengelola dan mengembangkan pariwisata secara optimal.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata melalui pelatihan, seminar-seminar kepariwisataan sehingga pengembangan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat.

Daftar Pustaka

- Creswell, John W 2002. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. London: Sage Publications.
- Conyers, Diana dan Hills, Peter. 1990. *An Introduction to Development Planning in The Third World*. Jhon Wiley dan Sons. New York
- Edgell Sr, David L., Allen, Maria D., Smith, G., Jason, R. Swanson, (2008): *Tourism Policy and Planning: Yesterday, Today, and Tomorrow*, Elsevier, Burlington.
- Fandeli, Chafid, 2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*. Liberty Offset, Yogyakarta.
- Goeldner, Charles A. and J.R. Brent Ritchie, (2006). *Tourism: Principles, Practices, Philosophies* (10th ed.), Wiley, Hoboken, NJ.
- Joyosuharto, S., 2000. *Aspek Ketersediaan dan Tuntutan Kebutuhan Dalam Pariwisata*, dalam Dasar - dasar Manajemen Kepariwisata Alam, (Editor: Ch. Fandeli) Yogyakarta: Liberty
- Marpaung, Happy, 2002. *Pengetahuan Pariwisata* edisi revisi. Alfabeta, Bandung.
- Nugroho D, Riant. 2007. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Gramedia

Pendit, Nyoman S. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : Pradnya Paramita.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi

Taufik, Tatang A. 2005. *Pengembangan Sistem Inovasi Daerah: Perspektif Kebijakan*. Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Unggulan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : UMM Press

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Website :

<http://www.pemkot-salatiga.co.id/>

<http://www.kemendagri.go.id/>

<http://www.salatigakota.bps.go.id/>

Jurnal:

Dian Novitasari *Analisis Kebijakan Terhadap Pengembangan Pariwisata Di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang*, Kebijakan dan Manajemen Publik, volume 1, Nomor 1, 1 Januari 2014

Indah Dwi Ariestaningrum *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3 (1) 2015 : 253-264
ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.org © Copyright 2015

Putro Prasetyo *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 2013, 1 (1): 151-164 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.org © Copyright 2013

Aswin Rizkiano *Pengukuran Tingkat Kemampuan Daerah Dalam Mendukung pelaksanaan otonomi Daerah Periode 2004-2008 di Kota Salatiga*, 2011

Timang Setyorini *Kebijakan Pariwisata Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Semarang*, 2005